

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA BANI Umayyah

¹Ratu Kirani, ²Nova Wildan Firmansyah, ³Erina Helda Mariyah

Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

[1kiraniratu@gmail.com](mailto:kiraniratu@gmail.com), [2nofa.wildan@gmail.com](mailto:nofa.wildan@gmail.com), [3mariyahhelda@gmail.com](mailto:mariyahhelda@gmail.com)

Abstrak

Artikel ini menjelaskan gambaran ekonomi Islam di era Daulah Bani Umayyah. Informasi didapat dengan menelusuri pustaka dari berbagai sumber, seperti: buku-buku, artikel-artikel, dan dokumen-dokumen yang dipublish di internet. Hasil analisis sejarah ekonomi pada masa Daulah Bani Umayyah digunakan untuk menjawab permasalahan ekonomi dan pelajaran dalam aktivitas ekonomi kontemporer. Hasilnya diketahui bahwa ekonomi di era Daulah Bani Umayyah muncul karena ijthad para fuqoha' sehingga pengembangan ekonomi semacam ini bisa ditiru di era sekarang.

Kata kunci: ekonomi, Islam, bani umayyah, khalifah.

Abstract

This article describes the picture of Islamic economics in the era of the Umayyad State. Information is obtained by browsing libraries from various sources, such as: books, articles, and documents published on the internet. The results of economic history analysis during the time of the Umayyad State are used to answer economic problems and lessons in contemporary economic activity. The result is known that the economy in the era of the Umayyad State emerged because of the ijthad of the fuqoha' so that this kind of economic development can be imitated in the present era.

Keywords: economy, Islam, Umayyads, caliphs

PENDAHULUAN

Perekonomian merupakan salah satu unsur yang penting dalam pembangunan suatu negara. Pembangunan negara akan terlaksana sejalan dengan perekonomian yang ada dalam negara tersebut. Kestabilan kondisi perekonomian suatu negara merupakan cermin yang bisa menggambarkan kondisi kesejahteraan (Elviandri et al., 2018). Salah satu contoh pada era Daulah Bani Umayyah ada seorang pemimpin bernama Abdul Malik bin Marwan. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan ini terjadi perkembangan di dunia perdagangan dan perekonomian. Kondisi perekonomian sangat teratur dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara (APBN). Kondisi ini didukung oleh faktor keamanan dan ketertiban sehingga menjamin terciptanya masyarakat yang makmur sampai pada tingkat yang luar biasa. Konsep Baitul Mal sebagai APBN di era Daulah Bani Umayyah berkembang pesat (Utomo, 2017a).

Telah diriwayatkan bahwa pada masa Khulafaur al-Rasyidin semua doktrin-doktrin ekonomi Islam banyak diperkuat dan dikembangkan melalui berbagai bentuk ijtihad seorang khalifah. Doktrin ini berkembang kemudian hari menjadi madzhab-madzhab ekonomi sampai di era kontemporer sekarang, misalnya madzhab ekonomi Islam mainstream (Hakim, 2016). Aktifitas ini kemudian bisa memberikan dampak yang optimal terhadap pencapaian visi dan misi ekonomi Islam. Sedangkan pada masa Bani Umayyah kebijakan ekonomi banyak dibentuk berdasarkan ijtihad para fuqoha dan ulama, khususnya di bidang ekonomi (Mudhiyah, 2015). Ijtihad sebagai salah satu cara dalam memberikan solusi atas problem perekonomian memang harus diambil sebagai konsekuensi semakin jauhnya jarak waktu (lebih dari satu abad) antara zaman kontemporer sekarang, era Daulah Bani Umayyah dari kehidupan di zaman Rasulullah Muhammad SAW (Lusiana, 2013).

Latar belakang di atas mengundang rasa penasaran penulis. Berawal dari sinilah kemudian penulis membuat makalah ini dengan tujuan untuk memahami bagaimana sejarah pemikiran ekonomi Islam yang dulu pernah berjaya khususnya di era Daulah Bani Umayyah dan dapat menjawab gelisahan yang ada pada penulis tentang rasa ingin tahu terhadap ekonomi Islam di masa kejayaan Islam tersebut. Kemudian setelah mengetahui sejarah ekonomi Islam, khususnya di era Daulah Bani Umayyah bisa menjadikan penulis terinspirasi mengetahui lebih jauh perkembangan ekonomi Islam kontemporer.

METODE

Penulisan ini diawali oleh tugas kuliah di mata kuliah Sejarah Ekonomi Islam di Kampus STEI Hamfara Yogyakarta. Penulis kemudian berkordinasi dengan tim untuk kerjasama dan berkolaborasi dalam mencari sumber-sumber informasi. Sumber informasi didapat dari beberapa artikel, buku-buku, dan dokumen-dokumen yang sudah dipublish di internet. Penulis kemudian diskusi dengan matang bersama tim untuk menghasilkan rumusan dan kerangka pikiran artikel ini. Pendampingan oleh dosen pengampu mata kuliah sangat berarti dalam proses analisis sehingga menghasilkan artikel ini.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil penulisan artikel ini adalah ditemukannya informasi bahwa kondisi perekonomian Islam di era Daulah Bani Umayyah sangat maju. Kemajuan pengelolaan keuangan publik yang terjadi di era ini didorong oleh semangat jihad dan futuhat ke luar negeri. Harta rampasan perang menjadi penyokong terbesar masukan atau pendapatan negara yang masuk di pos Baitul Mal atau APBN Daulah Umayyah. Umar bin Abdul Azis terkenal dengan kemakmuran warganya sehingga tidak ada yang berhak menerima zakat. Abdul Malik bin Marwan terkenal dengan pencetakan koin dinar dirham sebagai mata uang Islam sehingga menjadikan negara mandiri dari ketergantungan pada Romawi dan Persi.

A. Tradisi dan Praktek Ekonomi Bani Umayyah

Carl Brockelmann menyebutkan, pada tahun 693 Khalifah Abdul Malik secara bulat menetapkan untuk mencetak uang sendiri di damaskus. Sementara itu Hajjaj pada tahun berikutnya melakukan hal yang sama. Akibatnya masyarakat Arab sudah mulai mengenal sistem perhitungan. Ide ini juga diterima di Yaman, Siria, dan Iraq. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Khalifah Abdul Malik tersebut, sangat berpengaruh terhadap perekonomian dinasti itu (Zatadini & Ghozali, 2018).

Pada masa pemerintahan Abdul Malik, perkembangan perdagangan dan perekonomian, teraturnya pengelolaan pendapatan negara yang didukung oleh keamanan dan ketertiban yang terjamin telah membawa masyarakatnya pada tingkat kemakmuran. Realisasinya dapat kita lihat dari hasil penerimaan pajak (kharaj) di

wilayah syam saja, tercatat 1.730.000-dinar emas setahun. Kemakmuran masyarakat Bani Umayyah juga terlihat pada masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz. Keadaan perekonomian pada masa pemerintahannya telah naik ke taraf yang menakjubkan. Semua literatur yang ada pada kita sekarang ini menguatkan bahwa kemiskinan, kemelaratan, dan kepapaan telah dapat diatasi pada masa pemerintahan khalifah ini (Utomo, 2017a).

Pada masa Hisyam Abdul Malik, gubernur mempunyai wewenang penuh dalam hal administrasi politik dan militer dalam propinsinya, namun penghasilan daerah ditangani oleh pejabat tertentu yang mempunyai tanggungjawab langsung pada khalifah. Pada masa pemerintahan Muawiyah, konsolidasi internal mulai dilakukan tujuannya adalah untuk memperkuat barisan dalam rangka pertahanan dan keamanan dalam negeri, antisipasi atas setiap gerakan pemberontak. Baitul Mal yang selama masa pemerintahan sebelumnya difungsikan sebagai dana swadaya masyarakat untuk kepentingan rakyat namun pada masa Muawiyah telah berubah fungsi menjadi harta keluarga negara. Rakyat hanya wajib untuk menyetor pajak tanpa mempunyai hak menanyakan penggunaannya. Pada masa ini pajak negara didirikan penggunaannya menjadi harta pribadi para khalifah, kecuali pada masa kepemimpinannya Umar Bin Abdul Aziz, beliau tidak pernah mengambil bagian dari Baitul mal tersebut bahkan semuanya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat (Utomo, 2017b).

Naiknya Muawiyah ke tampuk pemerintahan Islam merupakan awal kekuasaan Bani Umayyah. Sejak saat itu pula, pemerintahan Islam yang bersifat demokratis seperti yang telah dipraktekkan Rasulullah SAW dan khulafa arrasyidin berubah menjadi monachiheridetis (kerajaan turun menurun). Muawiyah memperoleh kekuasaan melalui jalan kekerasan, diplomasi, dan tipu daya tidak melalui jalan musyawarah. Dalam menjalankan kekuasaannya, ia tetap menggunakan istilah khalifah yang diartikan sebagai penguasa yang diangkat oleh Allah. Sejak bani umayyah berkuasa, seorang khalifah tidak lagi harus seorang ahli hukum agama (fuqaha). Dinasti ini mulai memisahkan antara pemegang otoritas keagamaan dengan pemegang otoritas politik. Urusan agama diserahkan kepada para ulama, sedangkan urusan politik diserahkan kepada para penguasa. Pada masa daulah ini, pusat penyelenggaraan administrasi pemerintahan berada di Damaskus, sedangkan pusat aktifitas keagamaan berada di Madinah (Zuhri, 1997).

B. Pemikiran Ekonomi Islam Bani Umayyah

Dibandingkan dengan bidang-bidang keilmuan lain, sumbangan ke khalifahan Bani Umayyah di bidang ekonomi memang tidak begitu menonjol, Namun demikian terdapat beberapa sumbangan pemikiran mereka terhadap kemajuan ekonomi Islam diantaranya adalah perbaikan terhadap konsep pelaksanaan transaksi saham, murabahah, muzara'ah serta kehadiran kitab al-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf yang hidup pada masa pemerintahan khalifah Hasyim yang membahas tentang kebijakan ekonomi, dipandang sebagai sumbangan pemikiran ekonomi yang cukup berharga (Ghozali & Khoirunnisa, 2018).

Wilayah Islam pada zaman Daulah Bani Umayyah membentang jauh tersebar mulai dari India, Punjab, Balkhan, Bukhara, Afghanistan sampai Afrika Utara, Aljazair, Maroko dan dataran Eropa selatan. Pusat pemerintahan Daulah Bani Umayyah ada di Damaskus. Kisah paling heroik pada masa ini yang terekam dalam buku sejarah di antaranya adalah penaklukan Spanyol melalui seorang panglima perang yang gagah berani. Penaklukan selat pemisah antara Maroko dengan daratan Eropa selatan atau Spanyol oleh Thariq bin Ziyad r.a. Thariq berhasil mendarat di suatu daerah yang sekarang bernama Gibraltar (Jabal Thariq) yang sekarang bernama Spanyol (Mudhiiah, 2015).

Salah seorang Khalifah dari Daulah Bani Umayyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz bin Marwan (682 M) memimpin dalam waktu sangat pendek, hanya dua tahun namun kesejahteraan rakyat di masa itu betul-betul terjamin. Distribusi harta zakat dilaksanakan di luar kota karena di dalam kota tidak ada fakir miskin yang berhak menerimanya. Yahya bin Said, seorang petugas zakat pada waktu itu berkata, "Saya pernah diutus oleh Khalifah Umar bin Abdul Azis untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud untuk membagikannya kepada fakir miskin. Namun saya tidak menemukan seorang pun. Umar bin Abdul Azis telah menjadikan semua rakyatnya hidup dalam kecukupan ekonomi (Zatadini & Ghozali, 2018). Akhirnya saya putuskan untuk membeli budak lalu memerdekakannya." Kemakmuran itu merata diseluruh wilayah kekhilafahan Islam. Tidak hanya di Afrika, tapi juga di Irak dan Bashrah. Umar melanjutkan tradisi kakeknya, Umar bin Khattab (Israil, 2011).

Abu Ubaid menulis di kitab al-Amwal bahwa Umar bin Abdul Azis menulis surat kepada Gubernur Irak, agar membayar gaji dan hak rutin di wilayah itu. Umar bin Abdul Azis pun menyerukan agar jika ada warga negaranya yang belum bekerja segera melapor kepada negara, maka negara akan memberinya pekerjaan atau siapa saja pemuda yang mau menikah tapi kesulitan bayar mahar, maharnya akan ditanggung negara, atau warga negara yang mempunyai hutang menumpuk sampai tidak bisa mengganti melunasinya maka negara yang akan melunasinya. Begitu juga terjadi di daerah Bashrah, ketika gubernur Bashrah berkirim surat kepada Khalifah Abdul Azis menyatakan bahwa semua rakyatnya hidup dalam kesejahteraan sampai-sampai dia sendiri khawatir mereka akan terperosok dalam sikap takabbur dan sombong. Sekalipun rakyatnya sudah makmur, Umar bin Abdul Azis tetap sederhana, jujur dan zuhud sebagaimana yang dilakukan oleh kakenya Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan sejak awal menjabat Khalifah, beliau mencabut hak-hak istimewa keluarga Bani Umayyah yang didapat dengan cara menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar hukum seperti tanah garapan dan lain sebagainya. Khalifah Abdul Azis memulai dari dirinya sendiri dengan menjual seluruh harta kekayaannya sejumlah 23.000 dinar (sekitar Rp. 12 miliar) (Febriani & Jalaluddin, 2017; Ghozali & Khoirunnisa, 2018; Wally, 2018).

Pada era Umayyah juga dicetak koin dinar dirham di era kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan. Kebijakan ini menjadikan negara mandiri tidak tergantung kepada Romawi dan Persi yang lebih dahulu menggunakan koin emas perak dan menyebarkannya sampai ke dunia. Kebijakan ini menjadikan Daulah Umayyah semakin kuat dalam hegemoni perekonomian dunia di masanya (Ibrahim, 2021).

KESIMPULAN

Sebuah negara jika ingin maju harus memperhatikan perekonomian warga negaranya. Daulah Umayyah maju dengan jihad dan futuhat sehingga harta rampasan perang melimpah. Umar bin Abdul Aziz menjalankan kebijakan seperti Kakeknya, Umar bin Khattab sehingga tidak ada warga negara yang layak mendapatkan zakat karena saking sudah pada makmur. Menjaga kemandirian negara juga penting dengan cara mencetak mata uang sendiri di zaman Abdul Malik bin Marwan.

DAFTAR PUSTAKA

- Elviandri, Farkhani, Dimyati, K., & Absori. (2018). The formulation of welfare state: The perspective of Maqāid al-Sharī'ah. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(1), 117–146. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.117-146>
- Febriani, A., & Jalaluddin. (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi: Studi Kitab Al-Amwal. *Jurnal Syariah*, IX(2), 128–149.
- Ghozali, M., & Khoirunnisa, R. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10068>
- Hakim, R. (2016). Islamisasi Ekonomi Madzhab Mainstream: Tinjauan, Model dan Implikasi. *Iqtishodia*, 1(1), 79–94.
<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/58/63/>
- Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Israil, S. (2011). KEBIJAKAN EKONOMI UMAR BIN KHATTAB Syarifuddin Israil STIE Muhammadiyah Tanjung Redeb, Jl. Dr. Murjani II Berau-Tanjung Redeb. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 12(April), 91–98.
- Lusiana, A. (2013). Konsep Ekonomi Pada Masa Rasulullah Nabi Muhammad SAW. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Mudhiyah, K. (2015). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *Iqthishadia*, 8(2), 189–210.
- Utomo, Y. T. (2017a). Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam: Perspektif Historis. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 17(2), 156–171.
<http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaui/article/view/24>
- Utomo, Y. T. (2017b). Succes Story of Islamic Public Finance: Historical Perspective. *AT-TAUZI: Jurnal Ekonomi Islam*, 156–171.
<http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaui/article/view/24>
- Wally, S. (2018). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al Syaibani Dan Abu Ubaid. *Tahkim*, 14(1). <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.580>

Zatadini, N., & Ghozali, M. (2018). Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah.
AL-FALAH : Journal of Islamic Economics, 3(1), 29.
<https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.404>